BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berakhirnya Perang Dunia II, telah membawa perubahan besar dalam pola-pola hubungan antarnegara di level internasional. Perubahan besar itu terlihat dengan bermunculannya organisasi-organisasi kerjasama antarnegara, terutama di tingkat regional, misalnya Uni Eropa atau *European Union* (EU) di Eropa, *North America Free Trade Area* (NAFTA) di Amerika Utara, *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) di Asia Tenggara, dan *Mercado Comun del Sur* (MERCOSUR) di Amerika Latin. Kehadiran organisasi-organisasi tersebut tentunya memberi warna baru bagi Hubungan Internasional (HI), dimana dunia cenderung bergerak menuju pada suatu tatanan dunia baru yang dikuasai organisasi-organisasi regional dan negara-negara ada dalam satu kesatuan (integrasi). Sebagai akibatnya, batas-batas negara menjadi kabur identitas wilayah menjadi samar serta terjadi pengerucutan jumlah negara. Terbentuknya organisasi-organisasi regional tersebut semakin dibuat kompleks oleh adanya arus globalisasi (Luhulima, 2002:12).

Salah satu organisasi regional yang pertama muncul pasca Perang Dunia II, yaitu Uni Eropa yang dulunya Masyarakat Eropa. Awal berdirinya dapat ditelusuri di akhir masa Perang Dunia II, ketika para anggota pendirinya memutuskan bahwa cara terbaik untuk mencegah konflik adalah dengan membentuk *European Coal and Steel Community* (ECSC) atau Komunitas Batu

Bara dan Baja Eropa, organisasi ini mengelola secara bersama produksi batu bara dan baja, dua bahan utama yang diperlukan untuk berperang. Traktatnya ditandatangani tanggal 18 April 1951, di Paris dan berlaku sejak 25 Juli 1952 sampai tahun 2002. Negara-negara pemrakarsa Uni Eropa adalah Belgia, Jerman, Prancis, Italia, Luksemburg, dan Belanda. Dalam perkembangannya terjadi perluasan keanggotaan dan sampai saat ini Uni Eropa telah memiliki 28 negara anggota sampai tahun 2013 dengan bergabungnya negara terakhir Kroasia (http://id.wikipedia.org/wiki/Perluasan_Uni _Eropa, diakses 12 Maret 2014).

Dalam buku Taufik Adi Susilo “Mengenal Benua Eropa”, dijelaskan bagaimana proses integrasi Masyarakat Eropa yang di awali pada tahun 1973, Denmark, Irlandia, dan Inggris Raya bergabung menjadi anggota Uni Eropa. Yunani pada tahun 1981, kemudian disusul oleh Spanyol dan Portugal tahun 1986. Reunifikasi Jerman tahun 1990, membawa masuk wilayah Jerman Timur. Tahun 1995 Austria, Finlandia, dan Swedia resmi menjadi anggota dari Uni Eropa. Perluasan pada tahun 2004 membawa masuk negara-negara Eropa Timur, seperti: Republik Ceko, Estonia, Siprus, Latvia, Lithuania, Hongaria, Malta, Polandia, Slovenia, dan Slowakia. Kemudian disusul oleh Bulgaria dan Rumania pada tahun 2007. Dan akan disusul Kroasia sebagai anggota ke-28 secara resmi pada tanggal 1 Juli 2013 karena telah menandatangani perjanjian penggabungannya pada tanggal 9 Desember 2011 (Susilo, 2009:114-115).

Negara-negara lain yang menjadi kandidat anggota Uni Eropa adalah *Macedonia, Montenegro,* dan *Turke*y. Namun, salah satu dari ketiga negara ini, yakni Turki menghadapi berbagai hambatan untuk menjadi anggota Uni Eropa.

Persoalan budaya atau persoalan agama kemungkinan yang menjadi halangan sebab Turki telah mendaftar sejak tahun 1980. Syarat menjadi anggota Uni Eropa adalah suatu negara harus memiliki demokrasi yang stabil yang menjamin supremasi hukum, hak-hak asasi manusia, dan perlindungan kaum minoritas. Negara tersebut juga harus memiliki ekonomi pasar yang berfungsi serta administrasi publik yang dapat menerapkan dan mengelola undang-undang Uni Eropa (Susilo, 2009:113-115).

Dalam sejarah perjalanannya, Uni Eropa menjelma menjadi satu kekuatan baru yang tangguh dan disegani masyarakat internasional karena dianggap sebagai satu-satunya organisasi regional yang berhasil secara penuh mengintegrasikan anggota-anggotanya dalam satu wadah kebijakan bersama dan menjadi organisasi yang selalu dicermati kebijakannya, karena dapat dipastikan membawa dampak internasional dikarenakan kebijakan tersebut merupakan suara bersama yang ditaati oleh semua negara anggotanya. Kebijakan bersama Uni Eropa sangat terlihat pengaruhnya di bidang ekonomi, meskipun dalam beberapa kasus, keputusan-keputusan Uni Eropa masih memberikan pengecualian untuk tidak ditaati karena kondisi-kondisi khusus yang dialami negara anggota (Luhulima, 2002:18).

Misalnya kebijakan penggunaan mata uang tunggal *euro* yang belum dipenuhi oleh semua negara anggota. Dari 28 anggota, baru 18 negara yang resmi memakai *euro* sebagai mata uang negaranya yakni; Jerman, Irlandia, Belanda, Perancis, Luksemburg, Austria, Finlandia, Belgia, Italia, Portugal, Spanyol, Yunani, Slovenia, Siprus, Malta, Slowakia, Estonia dan Latvia. Wilayah pengguna mata

uang ini disebut “Zona Eropa”, sedangkan sepuluh negara lainnya yang belum menggunakan mata uang *euro* (*Zona Non Euro*) yaitu Denmark, Inggris, Swedia, Republik Ceko, Lithuania, Hongaria, Polandia, Bulgaria, dan Rumania (http://wikipedia.org/wiki/euro diakses 9 April 2014).

Hal tersebut memang diizinkan dalam Perjanjian Maastricht 1992, dengan konsepsi dasar *opt out* dan *opt in* (*opt in* adalah suatu kewajiban dari negara anggota tetap ikut dalam semua aturan yang dibuat oleh Uni Eropa, dan *opt out* adalah hak dari negara anggota Uni Eropa untuk keluar dari aturan-aturan yang dibuat oleh Uni Eropa jika bertentangan dengan kepentingan nasionalnya (http://www.eurotreaties.com/maastrichtec.pdf diakses 20 April 2014).

Pada tahun 1999, *euro* lahir di Eropa. Awalnya, *euro* adalah mata uang tunggal untuk menggantikan mata uang sebelas negara Eropa, yaitu; Austria (*schilling*), Belgia (*franc*), Finlandia (*markka*), Prancis (*franc*), Jerman (*mark*), Italia (*lira*), Irlandia (*punt*), Luksemburg (*franc*), Belanda (*guilder*), Portugal (*escudo*), dan Spanyol (*peseta*). Ketika suatu negara telah bergabung ke dalam zona *Euro*, peraturan yang harus ditaati adalah; utang pemerintah (baik dalam ataupun luar negeri) tidak boleh melebihi 60% Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihitung dari *market price*, defisit anggaran pemerintah tidak melebihi 3% Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi tidak melebihi 1,5% dari rata-rata di tiga negara terbaik, tingkat suku bunga yang tidak melebihi 2% dari tiga negara yang terbaik tingkat inflasinya, stabilitas nilai tukar yang tidak melebihi batas toleransi 2,5% dari batas *currency band* yang bergerak ke atas ataupun ke bawah (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=t0

0118&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1 diaskes 20 April 2014).

Penyatuan mata uang menjadi *euro* merupakan salah satu langkah negara-negara Eropa untuk mencetak “Eropa Baru” yang lebih kuat di pentas ekonomi dan politik dunia. Jika harapan ini terwujud, akan lahir Eropa Baru yang terintegrasi dengan konsumen sekitar 300 juta jiwa dan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) 6 triliun *dollar*. Eropa Baru ini bisa saja menandingi Amerika Serikat yang telah lebih dahulu dikenal sebagai negara *superpower*. Kekuatan baru ini akan bertambah besar jika Inggris, Denmark, Swedia, dan beberapa negara *Zona Non Euro* lainnya bergabung ke klub *euro* atau menggunakan mata uang *euro* (http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1999/01/05/KL/mbm.19990105.KL92730.id.html diakses 11 April 2014).

Selain penggunaan mata uang, masalah yang masih ditolak beberapa negara Uni Eropa hingga sekarang ini adalah Konstitusi Eropa. Dimana Perancis dan Belanda tidak setuju dengan konstitusi tersebut. Bahkan masalah ini dibawa sampai ke dalam referendum di kedua negara. Hasilnya, rakyat dua negara pendukung utama Uni Eropa ini tidak menyetujui konstitusi baru untuk membuat Uni Eropa lebih terintegrasi, dimana 55% masyarakat Perancis dan 62% masyarakat Belanda menolak Uni Eropa. Bagi mereka, Uni Eropa tidak lebih dari sebuah proyek *elite* para politisi karena penuh aturan birokrasi tetapi tidak memberikan keuntungan nyata buat masyarakat umum (http://europa.eu/about-eu/basic-information/decisionmaking/treaties/index_en.htm diakses 20 April 2014).

Perjalanan sejarah Uni Eropa sebenarnya penuh dengan keberhasilan. Tahun 1995 hampir seluruh negara Eropa Barat bergabung. Tahun 1998 sistem keuangan Eropa terintegrasi dalam mata uang tunggal: *euro*. Tahun 2004 bertambah lagi 10 negara Uni Eropa baru dari mantan negara komunis Eropa Timur. Ini menjadikan Uni Eropa sebagai kekuatan ekonomi besar di dunia sekaligus menjadi satu-satunya contoh organisasi regional terbaik dunia. Dapat dikatakan bahwa UE organisasi yang dikagumi oleh organisasi regional dan internasional (Luhulima, 2002:25).

Namun, kondisi ini berbalik dan membuat harapan itu goyah dengan adanya krisis ekonomi global yang mulai melanda Uni Eropa pada tahun 2008 sampai saat ini. Krisis ekonomi tersebut telah membuat Uni Eropa mulai memasuki fase-fase sulit. Krisis ekonomi Uni Eropa berasal dari kredit macet perumahan di Amerika Serikat yang telah menyebabkan krisis ekonomi global. Kedua krisis tersebut telah membawa implikasi buruk pada kondisi ekonomi global secara menyeluruh hampir di setiap negara baik di Kawasan Amerika, Eropa, maupun Asia Pasifik. Dampak tersebut terjadi karena tiga permasalahan yaitu adanya investasi langsung, investasi tidak langsung, dan perdagangan. Saat ini, hampir semua negara-negara di dunia menganut sistem pasar bebas sehingga terkait satu sama lain. Aliran dana bebas keluar masuk dari satu negara ke negara lain dengan regulasi moneter tiap negara yang beragam. Akibatnya setiap negara memiliki risiko terkena dampak krisis. Begitulah alur krisis ekonomi global Amerika Serikat mempengaruhi Uni Eropa sehingga bisa dilanda krisis ekonomi.

Inti dari krisis ekonomi Uni Eropa adalah ketidakmampuan negara dalam membayar utang-utangnya. Krisis ekonomi pertama kali melanda Yunani kemudian ke Irlandia, Portugal, Spanyol, dan Italia. Menurut salah satu lembaga pemeringkat utang terkemuka, *Moody's*, dalam soal nilai-menilai kinerja keuangan dan perekonomian negara, terdapat enam kelompok kategori.

Pertama, yaitu kemampuan yang amat tinggi memenuhi kewajiban keuangan dalam perekonomian negara. Ada enam negara zona *euro* yang termasuk dalam kategori ini, yaitu: Jerman, Finlandia, Belanda, Prancis, Luksemburg, dan Austria. Kedua, merupakan kategori negara yang mempunyai kapasitas sangat tinggi memenuhi kewajiban keuangannya. Negara yang masuk dalam kategori ini adalah Belgia, Spanyol, dan Slovenia. Ketiga, yaitu negara yang mempunyai kapasitas tinggi memenuhi kewajiban keuangannya. Namun, sewaktu-waktu menghadapi kondisi kesulitan keuangan dan ketidakstabilan domestik mendadak. Negara zona *euro* yang masuk dalam kelompok ini adalah Slovakia, Italia, Malta, dan Estonia. Keempat, yaitu kategori negara yang mempunyai kapasitas memenuhi kewajiban keuangannya, tetapi saat ini berada dalam kesulitan ekonomi. Negara zona *euro* yang masuk kategori ini adalah Cyprus dan Portugal. Kelima, merupakan kategori penilaian minimum bagi investasi di negara ini. Negara zona *euro* yang masuk kategori ini adalah Irlandia. Keenam, merupakan kategori beresiko tinggi, baik dalam investasi maupun sangat rendahnya kepercayaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya dan satu-satunya negara zona *euro* yang masuk dalam kategori ini, Yunani (http://www.theglobalreview.com/content_detail.php?lang=id &id=10028&type=6#.UYKNCt3ybMw diakses 23 April 2014).

Krisis ekonomi Uni Eropa mulai terasa pada tahun 2008 dan semakin ramai diperbincangkan pada pertengahan tahun 2009. Negara-negara Uni Eropa yang terkena krisis ekonomi memiliki utang yang lebih besar dari PDB-nya (di atas 60%), pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah bahkan sampai pada posisi minus dan juga negara-negara mengalami defisit anggaran yaitu pengeluaran negara lebih besar dari PDB. Sementara dalam Otoritas Moneter Uni Eropa telah diatur bahwa rasio utang negara zona *euro* tidak boleh di atas 60% dari PDB-nya dan defisit tiap negara tidak boleh di atas 3% dari PDB (http://www.radar-sulbar.com/ekonomi/krisis-mata-uang-tunggal-euro/ diakses 21 April 2014).

Di Yunani, utang negaranya terus menumpuk dari tahun ke tahun. Pada tahun 1993, posisi utangnya sudah di atas PDB-nya, dan sampai sekarang pun masih demikian. Saat ini utang Yunani diperkirakan telah mencapai 120% dari posisi PDB-nya. Posisi utang terakhir Yunani (setelah *adjustment*/penyesuaian) tercatat kurang lebih €350 miliar, atau sekitar US$ 450 miliar. Defisit anggaran tahun 2008 mencapai 9,1%. Dari tahun 2000-2007 (sebelum krisis ekonomi), Yunani mencatat pertumbuhan ekonomi sekitar 4,2%, namun setelah diterpa krisis hebat yang berkepanjangan, pertumbuhan ekonominya bisa dipastikan kurang dari angka tersebut (www.stiemj.ac.id/downlot.php?file=1.%20jurnal-krisis%20yunani diakses 21 April 2014).

Ketidakmampuan pemerintah Yunani mengatasi krisis ekonomi di dalam negerinya ini kemudian berimbas pada negara-negara lain di kawasan Eropa. Irlandia, Portugal, Spanyol, Italia, dan beberapa negara lain turut terkena dampak dari krisis Yunani ini. Efek domino ini dapat terjadi salah satunya diakibatkan

oleh keterikatan negara-negara Eropa tersebut di dalam sistem *Eurozone*. Krisis ekonomi yang tidak kunjung selesai dan justru berdampak ke negara Eropa lainnya ini juga berimbas pada merosotnya pasar saham di beberapa negara di dunia. Hal ini kemudian menjadi isu global yang hangat diperbincangkan (http://www.radar-sulbar.com/ekonomi/krisis-mata-uang-tunggal-euro/ diakses 21 April 2014).

Krisis ini tentu kemudian mendapat tanggapan serius dari Uni Eropa sebagai organisasi kawasan yang juga membawahi Yunani. Uni Eropa bersama negara-negara anggotanya berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mengatasi gejolak krisis yang tengah dihadapi oleh negara-negara anggotanya. Pengaruh perpolitikan turut pula mewarnai penyelesaian masalah krisis ekonomi ini. Alokasi dana pinjaman menjadi salah satu opsi yang ditawarkan Uni Eropa untuk mengatasi permasalahan ini. Namun, pinjaman atau *bailout* untuk Yunani ini sendiri masih menuai sejumlah kontroversi dan perdebatan di antara negara-negara Uni Eropa tersebut. Hal ini berkaitan dengan kemampuan Yunani untuk mengembalikan pinjaman ini dan melakukan pengetatan anggaran di dalam negerinya. Krisis ekonomi yang melanda Eropa ini kemudian turut pula menghadapi hambatan dan tantangan di dalam penyelesaiannya (http://www.bisnis.com/articles/pengetatan-anggaran-parlemen-jerman-setujui-hasil-ktt-ue-krisis-us diakses 23 April 2014).

Di tahun 2010, Yunani terus mengalami defisit hingga empat kali lipat dari batas defisit yang ditetapkan oleh *Eurozone*. Perdana Menteri Yunani yang baru terpilih yakni George A. Papandreou mulai mengatur sejumlah langkah untuk

mengatasi krisis ekonomi ini. Langkah awal yang diambil oleh Papandreou adalah dengan efisiensi dengan memotong defisit dan melunasi utang-utang yang menumpuk. Seperti dengan pemotongan biaya-biaya pekerja. Langkah selanjutnya yang diambil Papandreou adalah dengan meminta sejumlah bantuan ekonomi dari negara-negara tetangga di Eropa, Uni Eropa, dan juga *International Monetary Fund* (IMF). Troika yang terdiri dari Uni Eropa, IMF, dan *European Central Bank* (ECB) menyetujui untuk membantu Yunani melalui bantuan dana. Uni Eropa sendiri berjanji untuk segera membantu Yunani keluar dari krisis ekonomi yang sedang melanda. Uni Eropa juga mengambil langkah cepat guna menghindarkan negara-negara anggota lainnya terkena imbas dari krisis Yunani ini. Setelah sebelumnya Portugal, Irlandia, Spanyol, dan Italia telah terkena dampak krisis terlebih dahulu. Negara-negara di Eropa turut memaksa Yunani untuk melakukan pengetatan anggaran atau *austerity*. Untuk itulah di dalam tulisan ini akan dibahas lebih lanjut mengenai permasalahan krisis ekonomi Yunani, perbedaan di dalam penyelesaiannya, serta hambatan dan tantangan yang tengah dihadapi Uni Eropa dalam penyelesaian masalah-masalah internal kawasannya dalam penangangan masalah krisis ekonomi negara anggota Uni Eropa terutama Yunani yang diambang keluar dari *Eurozone* dan defisit yang terus bertambah (http://www.bisnis.com/articles/pengetatan-anggaran-parlemen-jermansetujui-hasil-ktt-ue diakses 23 April 2014).

Adapun, alasan peneliti mengambil negara Yunani adalah pertama alasan geografis yaitu karena wilayah georgrafis Yunani berdekatan dengan negara-negara dikawasan Eropa yang terkena dampak krisis ekonomi serta Yunani

merupakan anggota bagian dari benua Eropa yang tak lain bagian dari Uni Eropa yang notabene sejak terbentuknya menjadi kawasan yang mendapat sorotan dari mata internasional karena dinilai paling solid dalam bidang ekonomi dan politik sehingga memunculkan banyak prestasi dan kemajuan. Namun, kali ini menjadi perhatian dunia internasional bukan lagi karena kemajuannya tetapi karena terjadinya persoalan yang serius yaitu krisis ekonomi khususnya yang melanda Yunani. Jadi, dalam bahasan ini peneliti ingin mengetahui bagaimana kesiapan dan solidaritas regional Uni Eropa khususnya zona *euro* dalam mengatasi krisis ekonomi ini. Alasan kedua adalah faktor sebab-akibat, yaitu hal apa yang menyebabkan krisis ekonomi ini sehingga kerugian yang ditimbulkannya sangat besar bahkan mempengaruhi hampir semua negara di kawasan Eropa sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana sikap Uni Eropa sebagai organisasi regional dalam mengatasi hal krisis yang terjadi di kawasan ini. Alasan ketiga adalah faktor waktu, yaitu krisis ekonomi ini sudah berlangsung dalam waktu yang cukup lama (2008-sekarang) namun masih saja menjadi salah satu fokus dunia internasional sampai saat ini.

Uni Eropa sebagai organisasi regional tentunya diharapkan oleh banyak pihak khususnya negara-negara yang terkena krisis ekonomi agar segera mencari jalan keluar untuk membawa keluar negara-negaranya dari krisis tersebut sehingga perekonomian regionalnya bisa kembali stabil seperti sedia kala. Dari fakta tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian yang berjudul: “Peranan Uni Eropa Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Yunani (2009-2013)”.

Adapun ketertarikan peneliti untuk meneliti dan mengangkat isu tersebut didukung oleh beberapa mata kuliah disiplin Ilmu Hubungan Internasional, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Regionalisme, dapat diistilahkan sebagai pengelompokan regional yang diidentifikasi dari basis kedekatan geografis, budaya, perdagangan dan saling ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan, komunikasi serta ikut serta dalam organisasi internasional.
2. Organisasi Internasional merupakan fokus kajian peneliti menyangkut keterlibatan Organisasi Internasional, didalam matakuliah ini peneliti mempelajari mengenai peran aktor yang terlibat dalam interaksi antar Negara yang bersifat internasional dan menciptakan interaksi global.
3. Hubungan Internasional di Kawasan Eropa, merupakan sebuah kajian peneliti yang menyangkut bagaimana proses integrasi, konflik dan kerjasama antar negara serta kawasan Eropa.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, untuk memudahkan peneliti dalam melakukan pembahasan, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana Peranan Uni Eropa dalam mengatasi krisis ekonomi Yunani?”

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Rumusan masalah mayor kemudian diturunkan menjadi rumusan masalah minor, dimana dalam mengukur peranan sebuah organisasi dapat dilakukan pada sejauh mana organisasi dalam mencapai tujuannya, dimana tujuan dari Uni Eropa adalah memberikan bantuan dana, kemanusiaan serta hibah terhadap negara yang terkena dampak krisis ekonomi di negara anggotanya melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Dewan Uni Eropa.

Rumusan tersebut berupa:

1. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam mengatasi krisis ekonomi di Yunani?
2. Kendala apa yang menjadi hambatan-hambatan Uni Eropa dalam mengatasi krisis ekonomi di Yunani?
3. Bagaimana perkembangan ekonomi Yunani setelah mendapatkan bantuan dari Uni Eropa?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah penelitian dengan menitikberatkan pada Peranan Uni Eropa dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Yunani. Masa waktu yang telah dipilih mulai tahun 2009 yaitu ketika krisis dalam negeri Amerika Serikat menjadi Krisis Ekonomi Global pada tahun 2008, yang pada awal tahun 2009 krisis tersebut berdampak pada kawasan Eropa yang diawali dengan Yunani itu sendiri hingga 2013 sesuai dengan dimana para kreditur negara-negara anggota

Uni Eropa memberikan bantuan pinjaman dana untuk memulihkan dan menstablikan kembali perekonomian *Eurozone* dan Yunani.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apa saja Peranan yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam mengatasi krisis ekonomi Yunani serta faktor dan hambatan apa saja yang dilalui oleh Uni Eropa dalam memberikan bantuan untuk menangani krisis dalam negeri Yunani serta kawasan di Eropa.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui langkah-langkah Uni Eropa dalam mengatasi krisis ekonomi di Yunani
2. Hambatan-hambatan apa saja yang menjadi kendala Uni Eropa dalam mengatasi krisis di Yunani
3. Mengetahui Proses perkembangan krisis ekonomi di Yunani setelah mendapatkan bantuan dari Uni Eropa

1.4 Kegunaan Penelitian

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menguji konsep-konsep yang dipergunakan dalam studi hubungan internasional dalam menjelaskan berbagai fenomena hubungan bilateral dan migrasi internasional,

tidak hanya mengungkap fenomena mengenai hubungan internasional tetapi dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Organisasi Internasional sebagai inti konsep dari Penelitian yang berjudul Peranan Uni Eropa dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Yunani.

Secara praktis penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau acuan bagi para penstudi lainnya yang ingin mengkaji mengenai Peranan sebuah organisasi internasional dalam suatu kawasan atau *region* terhadap suatu negara.